

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah pers sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *press* dapat mempunyai pengertian luas dan sempit. Dalam pengertian luas pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi melancarkan atau menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran atau perasaan seseorang dan sekelompok orang kepada orang lain.¹ Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah tengah bulanan, dan sebagainya yang dikenal sebagai media cetak.² Sementara itu, dalam kajian ini yang akan dibahas adalah mengenai pers dalam artian sempit, yang hanya mencakup surat kabar harian.

Surat kabar atau pers dalam arti sempit merupakan alat komunikasi massa yang memberikan kepada lembaga-lembaga komunikasi secara tercetak, lembaga-lembaga yang memenuhi syarat-syarat publisita, periodisita, universalita dan aktualita. Periodesita pada umumnya berarti satu hari sekali atau beberapa kali dalam sepekan.³ Pada mulanya pers hanya digunakan dalam pengertian media

¹ Taufik, *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia* (Jakarta: PT. Triyinto, 1997), hlm. 7-8.

² F. Rachmadi, *Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara* (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), hlm. 9-10.

³ Oey Hong Lee, *Publistik Pers* (Jakarta: Ichtiar, 1965), hlm. 109.

yang berbentuk cetak saja, disesuaikan dengan arti dari kata *press* yaitu menekan atau mengepres.

Pers berkaitan dengan aktivitas menertibkan sesuatu dengan cara dicetak, Perkembangan pers Indonesia tidak terlepas dari kondisi politik Indonesia, pers di Indonesia mulai berkembang jauh sebelum negara Indonesia diproklamasikan. Pers telah dipergunakan oleh para pendiri bangsa kita sebagai alat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan.

Bagi masyarakat, pers mempunyai dua kedudukan pertama, merupakan media komunikasi tertua di dunia, kedua, pers sebagai lembaga masyarakat atau institusi sosial yang merupakan bagian integral dari masyarakat dan bukan merupakan unsur asing yang terpisah.⁴ Sebagai lembaga masyarakat pers juga mempengaruhi dan dipengaruhi lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Dari sudut pandang diatas, jelas bahwa pers menjalankan fungsinya sebagai salah satu institusi sosial yang penting dalam masyarakat. Sebagai media komunikasi, pers harus sanggup hidup bekerja sama dan berdampingan dengan lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Dalam hal ini, sifat hubungan antara satu dengan lainnya tidak luput dari falsafah yang dianut oleh masyarakat dan juga struktur sosial politik yang berlaku.

Surat kabar pertama berbahasa Jawa yang diterbitkan bernama *Bromartani* di Surakarta, dan dianggap sebagai perintis dalam pers pribumi.⁵ Pers pribumi

⁴ *Ibid.*

⁵ Nurani Soyomukti, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 207.

memiliki beberapa bahasa yaitu Melayu, Jawa, dan bahasa daerah lainnya yang telah digunakan dalam sejumlah surat kabar,⁶ surat kabar yang telah terbit seperti *Soaro Batak* dan *De Sumatrra Post*.⁷ Hal itu dapat dibuktikan sejak lahirnya Boedi Oetomo yang beriringan dengan bermunculan organisasi politik, surat kabar dan majalah pribumi yang ditangani oleh Bangsa Indonesia sendiri.

Pers yang telah membuat revolusi komunikasi, antara lain dengan mengubah pola komunikasi tradisional menjadi tertulis sehingga bahasa yang disampaikan lebih baik dan teratur, dalam arti tidak ada perubahan dalam proses penelusurannya pada generasi selanjutnya. Pada 12 Oktober 1960 Presiden Soekarno sebagai penguasa perang tertinggi mengeluarkan peraturan yang mewajibkan setiap penerbit mendaftarkan diri untuk mendapatkan Surat Izin Terbit (SIT). SIT bisa diperoleh jika pers memenuhi persyaratan antara lain loyal terhadap Manipol-Usdek, bersedia mentaati Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No.10 tahun 1960,⁸ serta bersedia menandatangani perjanjian pemenuhan kewajiban yang berisi 19 pasal.⁹

⁶ Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula*. (Jakarta: Hasta Mitra, 1985), hlm. 23.

⁷ Sejak awal pemerintah Hindia Belanda memberikan aturan ketat mengenai pers yang beredar diwilayahnya. Pemerintah Hindia Belanda juga seringkali bertindak represif terhadap sejumlah wartawan yang dianggap berbahaya bagi pemerintah. Multatuli bahkan mengibaratkan kerja redaktur pers di era ini dengan istilah “bekerja satu kaki dipenjara” sebagai gambaran betapa ketatnya pengawasan pemerintah Hindia Belanda terhadap pers di wilayahnya. Lihat Abdurrachman Surjomiharjo, *Beberapa Segi Perkembangan Pers di Hindia Belanda*. (Jakarta: Departemen Penerangan Republik Hindia Belanda), 1980, hlm. 31.

⁸ Lihat lampiran 7, hlm, 136.

⁹ Lihat lampiran 9, hlm, 141.

Masa Orde Baru yang ditandai dengan jatuhnya pemerintah Presiden Soekarno yang disertai pembubaran Partai Komunis Indonesia, dan digantikan oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia yang kedua menjadikan beberapa surat kabar yang izin terbitnya pernah dilarang oleh Soekarno dapat kembali terbit pada masa kepemimpinan Soeharto. Pada awal kepemimpinan Presiden Soeharto pers dan media lebih banyak diberikan ruang berpikir dan mengeluarkan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah terdahulu. Prioritas-prioritas yang diberikan oleh pemerintah Orde Baru juga dianggap menciptakan stabilitas sosial dan menumbuhkan kembali perekonomian yang sempat menurun pada masa orde lama.

Pers juga menciptakan sistem komunikasi terbuka, sehingga informasi dapat diperoleh oleh golongan manapun. Adanya informasi yang terbuka ini semua golongan berhak membaca dan memberikan kritik terhadap apapun tanpa ada intimidasi oleh pemerintah dan posisi monopolistik orang yang berstatus golongan kelas atas.¹⁰ Di Jawa Barat pers mengalami perkembangan yang cukup pesat, salah satu media pers yang mengalami perkembangan yaitu Harian Umum Pikiran Rakyat. Harian Umum (HU) Pikiran Rakyat dilahirkan untuk menjadi media yang kritis dan mendominasi di Jawa Barat. Pikiran Rakyat dikelola oleh generasi terbaik pada awal pendiriannya 1950, surat kabar ini diyakini akan terus tumbuh dan berkembang baik sebagai institusi sosial maupun bisnis.

¹⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 113.

Sejak dikeluarkan dekrit presiden pada tahun 1959 yang mengharuskan media untuk berafiliasi terhadap angkatan bersenjata membuat kondisi pers tidak dapat bergerak bebas. Tidak hanya itu, setiap penerbitan media cetak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SIT (Surat Izin Terbit). Adanya peraturan tersebut membuat surat kabar Pikiran Rakyat berhenti untuk sementara pada awal tahun 1966 dikarenakan media pikiran rakyat dianggap tidak berafiliasi kepada Angkatan Bersenjata. Tidak lama setelah itu, pada tanggal 24 Maret 1966 surat kabar Pikiran Rakyat muncul kembali dan bertepatan dengan peringatan ke-20 peristiwa heroik Bandung Lautan Api.

Pada awal tahun 1974, Pikiran Rakyat mencatat peristiwa penting, untuk pertama kalinya perusahaan berhasil melengkapi diri dengan sarana percetakan offset yang dibeli dari fasilitas PMDN dari bantuan BRI. Mesin cetak ini mampu mencetak koran sebanyak 25.000 eksemplar per jam. Sejak tahun itu, peredaran Pikiran Rakyat dapat merambah ke seluruh pelosok Jawa Barat dan memantapkan diri sebagai korannya orang Jawa Barat, sekaligus yang terbesar di provinsi Jawa Barat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kehidupan pers sebelum Orde Baru?
2. Bagaimana berdirinya surat kabar Pikiran Rakyat?
3. Bagaimana dinamika dalam perkembangan surat kabar Pikiran Rakyat pada tahun 1950-1974.

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya didasari dengan suatu tujuan yang ingin dicapai. Penelitian merupakan suatu kajian yang dilakukan guna menemukan dan mencari fakta yang menerapkan metode-metode ilmiah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

- a. Belajar menerapkan metode sejarah kritis sehingga dapat menghasilkan karya sejarah yang berkualitas.
- b. Untuk merekonstruksi peristiwa yang terjadi pada masa lampau
- c. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan koleksi sejarah untuk pengembangan ilmu sejarah.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana kehidupan pers sebelum Orde Baru.
- b. Memberikan penjelasan mengenai bagaimana berdirinya surat kabar Pikiran Rakyat.
- c. Memberikan penjelasan tentang dinamika dalam perkembangan surat kabar Pikiran Rakyat pada tahun 1950-1974.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis itu sendiri dan bagi pembaca tulisan ini nantinya.

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai indikator untuk mengetahui kemampuan meneliti dan menganalisa suatu peristiwa sejarah, serta menyajikannya dalam bentuk suatu karya sejarah.
- b. Menambah wawasan penulis dalam memahami fungsi pers kepada masyarakat Bandung.
- c. Memahami sebuah informasi melalui surat kabar. .

2. Bagi Pembaca

- a. Pembaca diharapkan dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana kehidupan pers sebelum Orde Baru.
- b. Pembaca diharapkan dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana berdirinya surat kabar Pikiran Rakyat.
- c. Sebagai referensi bagi penelitian tentang bagaimana dinamika dalam perkembangan surat kabar Pikiran Rakyat pada tahun 1950-1974.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penulisan sejarah diperlukan sebuah kajian yang akan memberikan jawaban sementara dari rumusan masalah yang akan ditulis. Kajian tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kajian pustaka dan kajian teori. Dalam penulisan ini, saya menggunakan kajian pustaka untuk menjawab sementara rumusan masalah. Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka dan literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Selain dibutuhkan untuk menambah informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam proses penulisan, kajian Pustaka sangat diperlukan dalam sebuah penelitian, karena melalui kajian

pustaka didapatkan landasan pemikiran dari karya tulis ilmiah yang nantinya digunakan.¹¹

Pada periode awal kebangkitan Orde Baru, sikap, persepsi, dan perlakuan penguasa terhadap pers, terutama pers non atau anti komunis telah berubah secara berarti. Pada awal kebangkitan Orde Baru, penguasa memandang dan memperlakukan pers non atau anti komunis sebagai pasangan kekuasaannya untuk mengganyang PKI dan para simpatisannya, kemudian untuk meruntuhkan kekuasaan Soekarno.

Pada masa orde baru pers merupakan alat komunikasi dalam pembangunan yang berfungsi untuk memotivasi perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Mass media setidaknya dapat diciptakan suasana yang menggunakan menguntungkan proses pembangunan hal itu karena mass media dapat menanamkan pengertian-pengertian pada rakyat tentang kemungkinan serta harapan harapan yang dapat dibawa oleh pembangunan. Pada masa orde pembangunan, surat kabar bukan hanya mencapai situasi riil masyarakat kepada pemerintah, tetapi juga sekaligus menyampaikan program-program dan kebijaksanaan pemerintah di bidang pembangunan kepada rakyat.¹²

Salah satu ciri masa Orde Baru yang merupakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dipelopori oleh pemerintah, dengan sendirinya juga pers harus mencerminkan adanya kegiatan pembangunan tersebut. Kemudian, untuk dapat

¹¹ Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta FIS UNY : Prodi Ilmu Sejarah, 2013), hlm. 6.

¹² Marwati Djoened Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 509.

melakukan peranan yang bermanfaat dalam masa pembangunan, sebagai satu unsur penggerak partisipasi rakyat, maka pers harus merupakan pers yang sehat. Sehat dalam pengertian mempunyai fasilitas yang memadai untuk dapat melakukan fungsinya, baik sebagai pers nasional ataupun fungsinya yang bersifat universal. Dalam kaitannya dengan pembangunan Nasional ini, pers harus mampu memberi penerangan-penerangan yang luas kepada masyarakat tentang maksud serta tujuan pembangunan tersebut. Pers harus mampu memotivasikan untuk dapat menimbulkan partisipasi rakyat dalam pembangunan, tanpa partisipasi rakyat disangsikan pembangunan akan berhasil. Pers sekurang-kurangnya dapat menciptakan suasana yang menguntungkan proses pembangunan karena dapat menanamkan pengertian-pengertian pada rakyat tentang harapan yang dapat dibawa oleh pembangunan itu.¹³

Titik tolak dari pembinaan pers nasional adalah Ketetapan Sidang Umum MPRS IV tahun 1966. Dalam ketetapan ini disebutkan kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan, dan bukanlah kebebasan dalam arti liberalisme. Atas dasar tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan UU No. 4 Tahun 1967, fungsi pers nasional menurut undang-undang tersebut adalah sebagai alat revolusi dan merupakan mass media yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, edukatif, informatif dan mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pers

¹³ I. Taufik, *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*, (Jakarta: Trinity Press, 1997), hlm. 85.

mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif.¹⁴

Sejak timbulnya peristiwa Gestapu¹⁵ sampai adanya Surat Perintah Sebelas Maret, koran yang masih terbit dapat dikatakan merupakan media masyarakat yang di waktu itu menentang kebijaksanaan rezim Orde lama dan menyokong penuh aksi-aksi mahasiswa atau pemuda, sehingga surat kabar yang terbit merupakan parlemen masyarakat, sama halnya dengan pers di zamam penjajahan Belanda. Namun, setelah keadaan mulai mereda akibat peristiwa Gestapu, kembali terlihat gejala-gejala yang biasanya melekat pada pers liberal terutama menjelang pemilihan umum pada tahun 1971. Persaingan antar koran nasional dan daerah terlihat dalam usaha merebut pasaran pembaca, hingga pernah diumumkan perang oleh koran-koran daerah terhadap koran ibukota.

Tibumlnya gejala-gejala yang tidak menguntungkan pada awal periode Orde Baru, antara lain disebabkan tidak adanya pembinaan yang tegas, baik dari instansi-instansi resmi, maupun oleh badan-badan atau organisasi-organisasi yang berkepentingan tentang adanya pers nasional yang sehat; pers nasional yang dapat melakukan fungsi-fungsinya, baik yang bersifat universal maupun sebagai alat perjuangan bangsa.¹⁶

¹⁴ Marwati Marwati Djoened Puspongoro dan Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, hlm. 508.

¹⁵ Gestapu atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30S/PKI 1965 adalah peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang berusaha menjatuhkan pemerintah Indonesia yang sah dengan kekerasan. Gerakan ini berhasil ditumpas dan akhirnya PKI dinyatakan sebagai organisasi politik terlarang di Indonesia.

¹⁶ I. Taufik, *op.cit.*, hlm. 79.

Pikiran Rakyat merupakan salah satu surat kabar yang terbit di Indonesia. Surat kabar ini mulai beredar sejak tanggal 30 Mei 1950 harus berhenti karena terlambat memenuhi ketentuan yang mengharuskan setiap koran untuk berafiliasi dengan salah satu kekuatan politik atau memilih bergabung dengan koran yang telah ditentukan oleh Departemen Penerangan. Atas dorongan Panglima Kodam (Pangdam) Siliwangi Ibrahim Adjie pada waktu itu, wartawan-wartawan tadi yang diwakili Sakti Alamsyah dan Atang Ruswita menerbitkan Koran Angkatan Bersenjata edisi Jawa Barat. Nomor perdana yang terbit pada 24 Maret 1966 ini bertepatan dengan peringatan ke-20 peristiwa heroik Bandung Lautan Api. Namun, belum genap setahun koran ini terbit, Menteri Penerangan mencabut kembali peraturannya tentang keharusan berafiliasi.¹⁷

Tahun 1974 adalah awal kebangkitan Pikiran Rakyat, surat kabar ini berhasil memiliki mesin cetak sendiri yang lebih modern dan representatif melalui fasilitas kredit dari BRI dan bantuan PMDN. Sejak tahun itu Pikiran Rakyat mampu tinggal landas menuju perwujudan cita-cita yang menyertai kelahirannya yaitu, menjadi surat kabar yang terus maju dan berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

¹⁷Andi Suwirta, "Pers, Revolusi, dan Demokratisasi: Kehidupan dan Pandangan Lima Surat kabar di Jawa pada Masa Awal Revolusi Indonesia" dalam *Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah*, No.6, Vol.III (Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, Desember 2002), hlm.43-74

F. Historiografi yang Relevan

Tugas sejarawan adalah merekonstruksi peristiwa sejarah,¹⁸ dan historiografi adalah sebuah rekonstruksi rekaman dan peninggalan masa lalu secara kritis dan imajinatif yang tercipta berdasarkan bukti-bukti atau data-data yang diperoleh melalui proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.¹⁹ Dapat dikatakan bahwa historiografi berarti pelukis sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu yang disebut sejarah. Sejarah sebagai pengetahuan tentang masa lalu diperoleh melalui penelitian mengenai kenyataan masa lalu dengan metode ilmiah yang sah.²⁰ Menurut Louis Gottschalk adalah proses rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yanrekaman serta peninggalan sejarah masa lampau.²¹

Historiografi yang relevan digunakan untuk bahan perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya sebagai penegasan bahwa karya yang akan ditulis adalah murni tulisan sendiri bukan hasil meniru dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hal inilah yang dijadikan landasan dalam penelitian ini untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau yang

¹⁸ Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah : Historical Explanation*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 99.

¹⁹ Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, terjemahan Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 29.

²⁰ Helius Sjamsuddin dan Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1996), hlm. 16.

²¹ Louis Gottschalk, *op. cit.*, hlm. 32.

tergolong baru. Adapun historiografi relevan yang di gunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut

Historiografi yang relevan pertama adalah skripsi dari Nunung Susanti, yang berjudul “Perkembangan Pers Mahasiswa: Terhadap Surat Kabar Glora Mahasiswas 1974-1998” jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UGM tahun 2001. Skripsi ini berisi tentang salah satu bentuk pers mahasiswa yang tumbuh dan berkembang di Yogyakarta. Surat kabar ini diterbitkan pertama pada bulan Mei 1974 atas dasar usaha dan pengelolaan Dewan Mahasiswa UGM. Gelora Mahasiswa (GM) yang tumbuh dan berkembang di tahun 1974-1979 merupakan bentuk surat kabar mahasiswa yang lahir dan terbit didalam kampus. GM dalam penerbitannya pada awalnya menyampaikan berbagai pokok persoalan yang dihadapi mahasiswa dan dunia kampus atau universitas pada umumnya. Namun, sejalan dengan perkembangan situasi politik yang terjadi, GM pun pada akhirnya juga memuat artikel-artikel mengenai kondisi sosial politik yang terjadi ditingkat makro (nasional).

Kedua, historiografi Toha Putratama, yang berjudul “Perkembangan Periklanan di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Pada Masa Orde Baru (1966-1998)” jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UGM tahun 2007, skripsi ini berisi tentang Surat Kabar Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta yang sudah berdiri sejak masa sesudah kemerdekaan. Surat kabar ini merupakan salah satu surat kabar yang tumbuh dan berkembang di Yogyakarta. Penerbitan surat kabar ini dapat membantu masyarakat yang berada di Yogyakarta untuk mendapatkan informasi yang berkembang pada saat itu. Dalam surat kabar ini terdapat beberapa kolom

yang berisi iklan. Iklan tersebut berguna bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang barang-barang yang ditawarkan oleh pengiklan dan ada juga barang-barang yang mereka butuhkan.

G. Metode Penelitian

Menurut kamus *The New Lexicon Webster's Dictionary of The English Language* (selanjutnya disebut *The New Lexicon*), metode penelitian ialah suatu cara untuk membuat sesuatu; suatu prosedur untuk mengerjakan sesuatu; keteraturan dalam berbuat sesuatu, berencana, dan lain-lain; suatu susunan sistem yang teratur. Metode sejarah juga dapat merekonstruksi sebanyak-banyaknya peristiwanya masa lampau manusia.²² Jadi metode dalam (*method*) ialah prosedur, teknik, atau cara-cara yang sistematis dalam melakukan suatu penyelidikan.²³ Metode sejarah adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi dan penyajian sejarah.²⁴ Sejarah sebagai ilmu, terkait dengan prosedur penelitian ilmiah dan juga pada penalaran berdasarkan fakta. Tujuan dari penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi serta menyesuaikan penggunaan metode pemecahan bukti-bukti untuk menegakkan

²² Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah* (Jakarta: Mega Book Store, 1986), hlm. 22-23.

²³ Helius Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 2.

²⁴ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 43-44.

fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.²⁵ Kebenaran sejarah terletak pada kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber sejarah secara tuntas sehingga diharapkan akan dapat mengungkap sejarah yang objektif. Disiplin ilmu sejarah pada dasarnya terkait pada langkah-langkah metode sejarah.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan 4 tahap dalam penulisan yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan. Metode tersebut adalah sebagai berikut²⁶

1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuriskein*, yang berarti memperoleh atau menemukan. Heuristik adalah kegiatan untuk mencari sumber-sumber masa lampau yang berupa data-data sejarah. Kegiatan ini ditujukan untuk menemukan dan mengumpulkan jejak-jejak dari setiap peristiwa sejarah yang sebenarnya. Sumber-sumber sejarah dibagi menjadi 2 yaitu sumber primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan informasi yang didapatkan langsung dari tangan pertama, atau langsung dibuat (waktu sama) dengan peristiwa yang dikaji.²⁷ Data-data dicatat dan dilaporkan oleh pengamat atau partisipan yang benar-benar mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa sejarah. Sumber primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

²⁵ Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979), hlm. 20.

²⁶ Louis Gottschalk, *op. cit.*, hlm. 43.

²⁷ *Ibid.*

Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung, Juli 1961.

Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung, Oktober 1962.

Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung, Januari 1963.

Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung, November 1963.

Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung, Januari 1964.

Surat Keputusan Penguasa Perang Tertinggi tentang izin penelitian dan penerbitan surat kabar 1960.

Peraturan Pernyataan wajib persetujuan 19 pasal bagi Pers, Sembilan Belas Pasal yang harus disetujui oleh penerbit surat kabar di tahun 1960.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang berasal bukan dari pelaku atau saksi atau kata lain pengkisah hanya tau peristiwa dari pelaku atau saksi. Sumber sekunder digunakan oleh para sejarawan dalam empat hal yaitu untuk mengenali latar belakang yang cocok dengan bukti-bukti sezaman mengenai subjek, untuk memperoleh petikan atau kutipan yang lebih lengkap dan sumber-sumber lain atau dokumen sezaman, untuk memperoleh interpretasi dan hipotesis mengenai masalah yang sama, namun hanya untuk menguji atau memperbaiki.²⁸ Dalam penelitian ini, saya mengumpulkan sumber-sumber yang tentu saja berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Saya menemukan sumber-sumber yang berkaitan dalam penulisan pada beberapa tempat seperti: Perpustakaan FIB UGM, Perpustakaan Yogyakarta, Kolose Ignatius, Perpustakaan UPT UNY, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UNY, Perpustakaan dan Lab Sejarah

²⁸ A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 57.

UNY, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia. Sumber sekunder dapat diartikan sebagai sumber yang ditulis sekarang atau sebelumnya berdasarkan sumber-sumber pertama. Sumber ini berupa buku-buku, laporan penelitian, karya ilmiah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi. Dalam penulisan ini, digunakan buku, laporan penelitian, dan surat kabar sezaman antara lain:.

F. Rachmadi, *Perkembangan syistem pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*, Jakarta: PT. Gramedia, 1990.

J.S. Badudu, *Cakrawala Bahasa Indonesia I*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Mochtar Lubis, *Pers dan Wartawan*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1962.

Sartono Kartodirdjon, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992

Staf Ensiklopedia Nasioanal Indonesia, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.

Taufik, *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*, Jakarta: PT. Triyinc, 1997.

2. Kritik Sumber

Setelah berhasil mengumpulkan sumber-sumber dalam penelitian. Langkah selanjutnya harus menyaring secara kritis terutama terhadap sumber primer, agar kemudian terjaring fakta-fakta sejarah yang menjadi pilihannya.²⁹ Dalam penelitian ini, penelitian harus mencari keabsahan data dengan melakukan penyaringan secara kritis. Kritik sumber dibagi menjadi dua yaitu kritik ekstern

²⁹ Helius Syamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 131.

dan kritik intern. Terhadap sumber-sumber primer maupun sekunder, kritik ekstern berkaitan dengan otentitas atau keaslian sumber sedangkan kritik intern lebih berkaitan dengan kredibilitas atau kepercayaan. Adapun penjelasan tentang kritik ekstern dan kritik intern adalah sebagai berikut

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern merupakan kritik yang dilakukan untuk menguji keaslian sumber. Kritik ekstern dilakukan dengan melihat aspek-aspek ekstrinsik dari sumber. Kritik ekstern dilakukan melalui verifikasi atau menguji terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah.³⁰ Kritik ekstern sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa peneliti sejarah menggunakan sumber yang asli dan bukan hasil rekayasa. Kritik ini juga digunakan untuk mengetahui autensitas atau keaslian sumber. Jenis-jenis fisik dari materi sumber seperti dokumen atau arsip seperti tanggal dokumen, bahan dokumen, sumber turunan atau asli, sumber utuh atau telah diubah.³¹

b. Kritik Intern

Penafsiran terdiri atas dua prosedur yang komplementer dan pengujian mengenai apa yang dimaksud peneliti, melihat keakurasian dari dokumen-dokumen dan membandingkan satu sama lain untuk bisa mendapatkan “fakta individual” yang menjadi dasar untuk merekonstruksi sejarah.³² Langkah ini tidak

³⁰ *Ibid*, hlm. 132.

³¹ Suhartono W. Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 29.

³² Daliman, *Panduan Penelitian Historis*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta, 2005), hlm.130-131.

terlepas dari prinsip seorang peneliti sejarah yang harus mengejar kebenaran (*truth*).

3. Interpretasi.

Interpretasi dapat diartikan sebagai penafsiran atas fakta-fakta sejarah, mencari hal yang saling berhubungan antara fakta yang satu dengan yang lainnya, sehingga rangkaian fakta tersebut bermakna dan logis. Subjektivitas sejarawan dikatakan terletak pada tahap interpretasi. Subjektivitas sejarawan memang diakui tetapi harus dihindari.³³ Interpretasi terdiri dari analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, di dalam suatu sumber sejarah terkandung beberapa kemungkinan. Analisis dilakukan untuk menentukan fakta dari data yang diperoleh. Sintesis berarti menyatukan, dari data-data yang terkumpul diambil suatu kesatuan untuk memperjelas maksud atau isi dari tulisan tersebut.

Pada tahapan ini, peneliti melakukan interpretasi atau penafsiran dengan cara menghubungkan antar fakta yang telah diteliti dengan memberi asumsi dan imajinasi terhadap fakta-fakta yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Penulisan juga akan menggunakan metode memahami (*verstehen*) yang dikemukakan Wilhelm Dilthey. Dilthey mengungkapkan jika tujuan ilmu-ilmu sosial adalah memahami makna (*sinnverstehen*) dan bukan menjelaskan (*erklaren*).³⁴ Hal tersebut dapat dipahami lewat produk-produk kebudayaan, proses kemunculan surat kabar Pikiran Rakyat dan peranan surat kabar tersebut dalam pergerakan

³³ *Ibid*, hlm. 132.

³⁴ F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*. (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm.63.

nasional Indonesia. Simpulan nantinya akan berisi hasil akhir dari fakta-fakta yang ditemukan oleh penulis selama penelitian.

4. Penulisan

Penulisan merupakan upaya mengorganisir hasil penelitian yang memerlukan hubungan logis antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya. Hal yang dilakukan adalah menyusun fakta-fakta sejarah menjadi suatu karya sejarah setelah melakukan pencarian sumber, penilaian sumber, dan menafsirkan yang kemudian dituangkan kembali menjadi suatu peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan.

H. Pendekatan Penelitian

Sejarah yang sangat terbatas dengan teori, sementara permasalahan yang harus dikaji sangatlah kompleks. Dibutuhkan ilmu lain sebagai pendekatan dan dapat membantu mengkaji permasalahan yang sedang penulis teliti secara lebih mendalam. Pendekatan yang dilakukan dalam sejarah dikenal dengan pendekatan multidimensional.³⁵ Pendekatan Sosiologi adalah suatu pendekatan yang menerangkan peranan sosiologi dalam menjelaskan perilaku manusia.³⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka akan digunakan pendekatan-pendekatan dalam skripsi ini sebagai berikut

³⁵ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 120.

³⁶ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 46.

a. Pendekatan sosial

Pendekatan perilaku dapat menggunakan pendekatan sosial dalam memahami perilaku anggota masyarakat. Pendekatan sosial diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku individu sebagai dari rangsangan sosial.³⁷ Salah satu teori sosial yang dapat diterapkan dalam penulisan ini adalah teori sosial oleh Bandura dan Walters. Pokok inti dari teori ini adalah ketika individu melihat suatu model atau rangsangan, maka akan terbentuk serangkaian simbol-simbol dalam imajinasinya.

Teori lainnya yaitu teori proses pergantian yang dikemukakan oleh Abdul Rivai yang sangat berguna untuk memahami pemikiran. Pemikiran Abdul Rivai memang banyak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan yang berasal dari Barat. Gagasan tersebut lalu dituangkan dalam tulisan-tulisan di Pikiran Rakyat. Hal ini akan sangat mempengaruhi arah dari Pikiran Rakyat termasuk orientasi politik surat kabar tersebut.

b. Pendekatan Politik

Pendekatan politik dalam penulisan ini sangat diperlukan karena media merupakan salah satu alat propaganda. Pendekatan politik ini digunakan untuk melihat adanya perkembangan dan permasalahan politik yang disampaikan melalui media surat kabar kepada masyarakat dari berbagai golongan.³⁸ Dalam sejarah adalah identik dengan politik, sejauh keduanya menunjukkan proses yang

³⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 3.

³⁸ Deliar Noor, *Pengantar ke Pemikiran Politik II*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 5.

mencangkup keterlibatan para aktor dalam interaksinya serta peranannya dalam usahanya memperoleh “apa, kapan, dan bagaimana”.³⁹

c. Pendekatan Komunikasi

Pendekatan komunikasi dipahami sebagai usaha penyampaian informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain. Media massa termasuk surat kabar memiliki tugas untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Informasi yang disebarluaskan tersebut hendaknya merupakan sebuah kebenaran yang disampaikan sebagaimana adanya. Informasi tersebut nantinya akan diolah menjadi berita serta tulisan-tulisan dalam surat kabar tersebut.

Analisis wacana kritis akan digunakan untuk memahami teks serta berita dalam surat kabar *Pikiran Rakyat*. Analisis wacana kritis berusaha untuk membongkar proses produksi dan reproduksi makna dalam suatu surat kabar.⁴⁰ Salah satu hal penting yang dianalisis disini adalah bahasa yang dipakai. Analisis ini juga dapat digunakan untuk mengungkap relasi kuasa yang ada dalam sebuah surat kabar. Hal tersebut akan digunakan untuk menganalisis serta memahami teks dalam surat kabar *Pikiran Rakyat* dan juga dalam pemikiran-pemikiran surat kabar tersebut.

³⁹ Sartono Kartodirjo, *Pndekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 149.

⁴⁰ Eriyanto, *Analisis Wacana. Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), hlm. 6.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang berupa ruang lingkup dan batasan penelitian. Terdapat pula rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, historiografi yang relevan, metode penelitian, pendekatan penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

BAB II KEHIDUPAN PERS DI BANDUNG SEBELUM ORDE BARU

Bab ini berisi tentang kehidupan pers di Bandung sebelum Orde Baru. Menjelaskan awal mulanya pers di Indonesia hingga sekarang, yang memberikan informasi melalui berbagai jenis surat kabar, majalah dan lain-lain. Kemudian, menjelaskan tentang munculnya pers pertama kali di Bandung.

BAB III BERDIRINYA SURAT KABAR PIKIRAN RAKYAT

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya surat kabar di Bandung, Menjelaskan tentang awal mula berdirinya surat kabar Pikiran Rakyat di Bandung. Kemudian, berisi tentang perkembangan Pikiran Rakyat di Bandung. Serta berisi tentang pandangan umum isi dalam surat kabar Pikiran Rakyat.

BAB IV DINAMIKA DALAM PERKEMBANGAN SURAT KABAR PIKIRAN RAKYAT PADA TAHUN 1966-1974

Pada bab ini berisi tentang dinamika dalam perkembangan surat kabar Pikiran Rakyat pada tahun 1966-1974. Kemudian dalam bab ini juga penulis memaparkan pasang surut penerbitan surat kabar di Bandung dan hambatan-hambatan ketika media surat kabar muncul di Bandung.

BAB V KESIMPULAN

Berisi kesimpulan dari perkembangan surat kabar di Bandung pada tahun 1966-1974 dan pengaruh terhadap masyarakat di Bndung yang dikemukakan secara singkat, padat, sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dimuat dalam bab 1.

